

**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2015**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Musi Rawas tahun 2010 – 2015, walaupun banyak keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;

Sebagai Proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini merupakan hasil dan upaya mengoptimalkan sumber daya yang ada serta merupakan kebulatan kesepkatan bersama yang dilaksanakan dan di pertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas, disadari bahan laporan kinerja instansi pemerintah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja tahun 2015 dan sebagai bahan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural dan fungsional serta semua pihak dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas, yang telah membantu dan memberikan kontribusi pemikiran serta masukan yang sangat mendukung terselesaikannya laporan ini.

Kritik dan saran membangun dari pembaca untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sangat kami harapkan, sekaligus sebagai *feed back* bagi peningkatan kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun berikut, sehingga percepatan *Good Governance* di negeri tercinta dapat terwujud dan menjadi nyata.

Muara Beliti, Februari 2016
Kepala DPPKAD Musi Rawas,

H.Gotri Suyanto, SE.M.Soc.Sc
Pembina Utama Muda
NIP.19620502 198903 1 016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum SKPD.....	1
B. Issu Strategik.....	5
C. Maksud dan Tujuan LKjIP.....	6
D. Sistematika Penulisan LKjIP.....	7
BAB II PERENCANAAN STRATEGIK	
A. Renstra SKPD.....	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2015.....	25
B. Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	
Penutup	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
• Lampiran 1 – Form Rencana Strategis (RS)	
• Lampiran 2 – Form Rencana Kerja Tahunan (RKT)	
• Lampiran 3 – Form Pengukuran Kinerja (PK).	
• Lampiran 4 – Form Perjanjian Kinerja.	

BAB.I.

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SKPD

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu lembaga daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Keuangan Daerah guna memanfaatkan secara optimal seluruh potensi dan sumber daya alam di Kabupaten Musi Rawas dengan tetap memperhatikan tata ruang serta kebutuhan masyarakat.

Dengan perencanaan yang baik, pemanfaatan potensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan kebutuhan dimasa lalu sehingga kita tahu apa yang dikerjakan sekarang dan tetap memperhitungkan persiapan kebutuhan dimasa yang akan datang, dengan kata lain bahwa tugas pokok DPPKAD Kabupaten Musi Rawas secara konkrit adalah memproyeksikan pemanfaatan aset potensi dan SDA Kabupaten Musi Rawas secara optimal antara sekarang dan masa yang akan datang dengan penentuan skala prioritas kebutuhan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang secara makro dengan tetap memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Musi Rawas.

A.1. STRUKTUR ORGANISASI & TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008, tanggal 31 Januari 2008, sesuai tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya DPPKAD memiliki fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dan program kerja dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi pendapatan, pendataan wajib pajak, wajib retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya, penyusunan program, perubahan dan perhitungan APBD serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
4. Penyusunan rencana dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
5. Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan pendapatan, belanja dan aset daerah;
6. Pengkoordinasi, pengendalian dan pembinaan atas pelaksanaan pemungutan pendapatan, belanja dan aset daerah;
7. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
8. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak penghasilan (PPH);
9. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas;
10. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

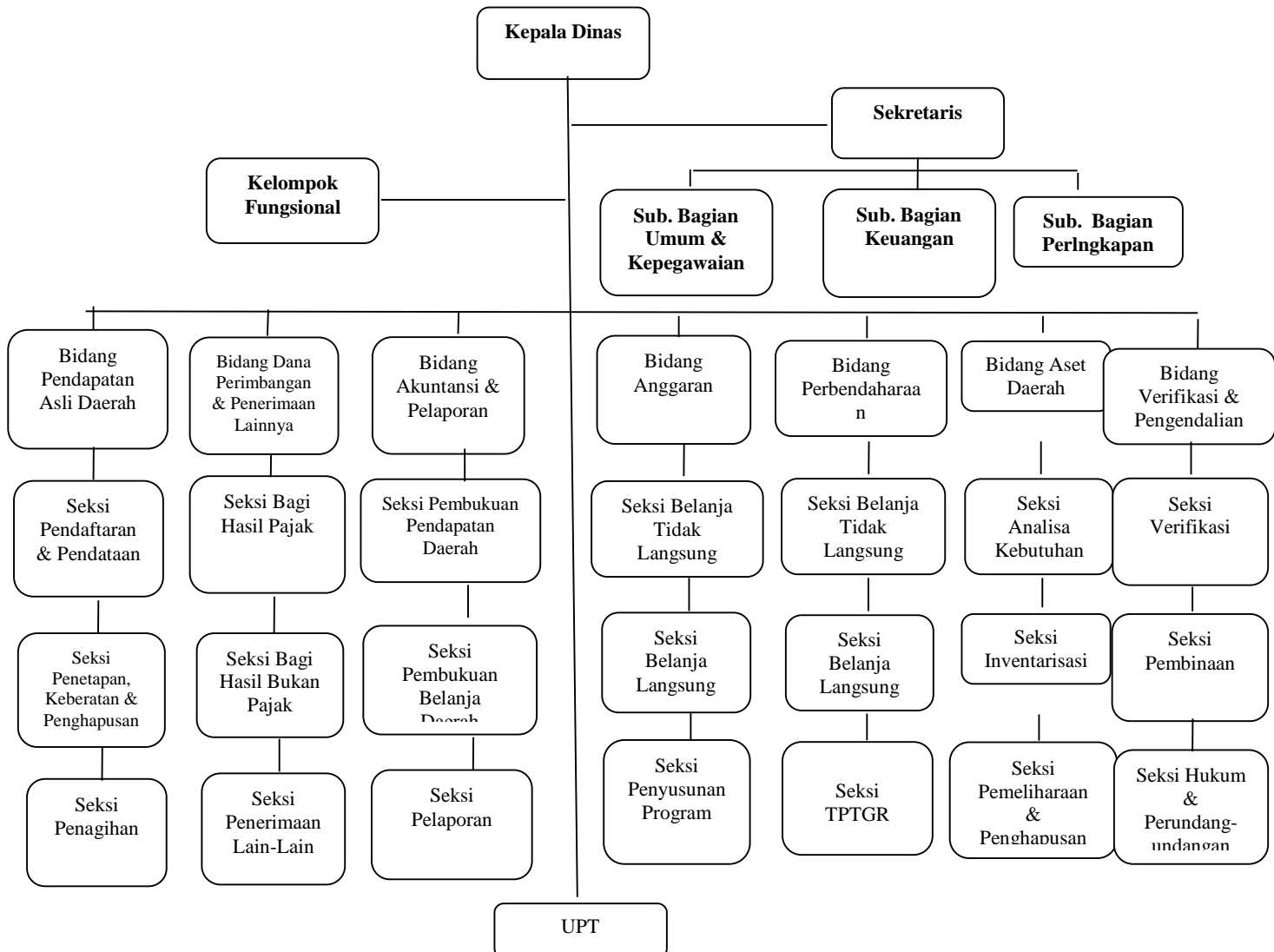
11. Pengesahan DPA-SKPD;
12. Pengendalian pelaksanaan APBD;
13. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
14. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
15. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan /atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
16. Pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
17. Penyimpanan uang daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas membawahi Sekretaris dan 7 (tujuh) bidang, yaitu:
 - 1) Bidang Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan lainnya;
 - 3) Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - 4) Bidang Anggaran;
 - 5) Bidang Perbendaharaan;
 - 6) Bidang Aset Daerah;
 - 7) Bidang Verifikasi dan Pengendalian.
2. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2) Seksi Penetapan, Keberatan dan Penghapusan;

- 3) Seksi Penagihan.
4. Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan lainnya, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 3) Seksi Penerimaan lain-lain.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Pembukuan Pendapatan Daerah;
 - 2) Seksi Pembukuan Belanja Daerah;
 - 3) Seksi Pelaporan.
6. Bidang Anggaran, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - 2) Seksi Belanja Langsung;
 - 3) Seksi Penyusunan Program.
7. Bidang Perbendaharaan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Belanja tidak langsung;
 - 2) Seksi Belanja Langsung;
 - 3) Seksi Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi (TPGR).
8. Bidang Aset Daerah, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Analisa Kebutuhan;
 - 2) Seksi Inventarisasi;
 - 3) Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan.
9. Bidang Verifikasi dan Pengendalian, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Verifikasi;
 - 2) Seksi Pembinaan;
 - 3) Seksi Hukum dan Perundang-undangan.
10. UPT; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DPPKAD KABUPATEN MUSI RAWAS



B. PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued) SKPD

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya potensi daerah merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan APBD Kabupaten Musi Rawas.

2. Kondisi masyarakat yang belum biasa menerima terjadinya peningkatan aktivitas pada suatu kegiatan yang dapat secara langsung berdampak kepada peningkatan pajak atau retribusi daerah sehingga dapat mempengaruhi pendapatan daerah sehingga tidak mencapai target yang diinginkan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PPKAD Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas PPKAD Kabupaten Musi Rawas adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Musi Rawas. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi Dinas PPKAD untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas PPKAD Kabupaten Musi Rawas secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem

pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Musi Rawas untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas PPKAD Kabupaten Musi Rawas yang dihasilkan. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil dicapai dikomunikasikan kepada *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PPKAD Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 adalah berikut ini:

- 1. Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2015 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas PPKAD Kabupaten Musi Rawas atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2015. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan/sasaran strategik telah dicapai selama tahun 2015.
- 2. Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi menjadikan LKjIP 2015 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Manajemen Dinas PPKAD Kabupaten Musi Rawas bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, Manajemen Dinas PPKAD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas PPKAD Kabupaten Musi Rawas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN LKjIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

terdiri dari Data Umum Organisasi, Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (*strategic issued*) Organisasi, Maksud & Tujuan, dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

terdiri dari: Rencana Strategis, Renja dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

terdiri dari: Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran tahun yang dilaporkan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karenanya seluruh jajaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

A. URAIAN SINGKAT VISI, MISI, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM JANGKA MENENGAH (RENSTRA-SKPD)

Rencana Strategik yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas menggunakan metode Deskriptif dan Induktif/ Analitik dengan melakukan diskusi intern, serta memanfaatkan informasi dan studi literature. Dalam garis besar dapat disampaikan bahwa

Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas secara Implisit didalamnya terjabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. VISI

Adapun Visi yang disepakati dan ditetapkan untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas tidak dapat lepas dari ruang lingkup Visi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan perangkat daerah di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan merupakan elemen penting didalam suksesnya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah : **“Terciptanya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilandasi dengan Prinsip Ekonomi, Efisien dan Efektif (Value For Money) “.**

2. MISI

Fungsi utama perumusan misi adalah sebagai titik tolak bagi perumusan strategik organisasi, selain itu perumusan misi juga berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan prioritas kebijakan organisasi, penyusunan program organisasi dan dalam melakukan alokasi sumber daya.

Misi Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

2. Penerapan Value For Money (Ekonomi, Efisien dan Efektif) dalam Pelaksanaan Anggaran;
3. Peningkatan Kualitas Aparatur.

Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh seluruh Aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Disiplin dan bermoral tinggi;
2. Bekerja dalam kebersamaan;
3. Kematangan dan berinteraksi dalam mengatasi permasalahan;
4. Memahami harapan masyarakat dan memenuhi janji secara tepat waktu.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan arah bagi sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini penting agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada. Karenanya diperlukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal guna menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh aparat Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah yaitu:

"Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Seluruh aparat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak ingin menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN. Namun bila disana sini masih terdapat kekurangan itu semata-mata karena masih dalam proses learning by doing untuk menyesuaikan dengan perubahan pesat yang cepat. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan kedalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas menetapkan 3 (tiga) tujuan strategik, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel II.1 Misi - Tujuan

No	Misi	Tujuan
1	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.1 Meningkatkan Manajemen aset dan akuntabilitas pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan profesional.
2	Penerapan Value For Money (Ekonomi, Efisien dan Efektif) dalam Pelaksanaan Anggaran	2.1 Meningkatkan Manajemen aset dan akuntabilitas pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan profesional.
3	Peningkatan Kualitas Aparatur	3.1 Meningkatnya Kualitas Aparatur

4. SASARAN DAN STRATEGI

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, menggambarkan tindakan-tindakan / aktivitas yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas menetapkan sasaran strategik sebagai berikut :

1. Meningkatnya tertib pengelolaan/ manajemen aset daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan;
2. Penerapan Prinsip ekonomi, efisien, efektif dan kepatutan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Meningkatnya Kinerja Aparatur.

Tabel II.2 Tujuan – Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
<i>Misi Kesatu</i>			
1	1.1 Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.1.1.Meningkatnya tertib pengelolaan/ manajemen aset daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SKPD yang tertib dalam pengelolaan keuangan daerah. 2. Ketersediaan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CALK)
<i>Misi Kedua</i>			
2	2.1 Penerapan Value For Money (Ekonomi, Efisien dan Efektif) dalam Pelaksanaan Anggaran	2.1.1.Penerapan Prinsip Ekonomi, Efisiensi, Efektif dan kepatutan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Regulasi dalam Pengelolaan Keuangan (LRA, Neraca, CALK) 2. Prosentase Pencapaian Target Pendapatan 3. Prosentase Peningkatan Belanja Daerah
		3.1.1.Meningkatnya Kinerja Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran 2. Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Prosentase Aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya 4. Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. DPPKAD Musi Rawas menetapkan sejumlah Strategi yang relevan untuk setiap misi, yaitu :

1. Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah;
2. Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran;
3. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang tupoksi SKPD;
4. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;
5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
6. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang handal.

Tabel II.3 Tujuan – Strategi

No	Tujuan	Strategi
	<i>Misi Kesatu</i>	
1	1.1. Meningkatkan Manajemen Aset dan Akuntabilitas Pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan profesional	1. Peningkatan system pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah

<u>Misi Kedua</u>		
2	2.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip ekonomi, efisien dan efektif dan kepatutan dalam pelaksanaan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah 2. Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran
<u>Misi Ketiga</u>		
3	3.1 Meningkatkan Kualitas Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang tupoksi SKPD 2. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang handal 3. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima.

5. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas telah menetapkan kebijakan dengan rincian sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Sistem Pelaporan Aset Daerah;
2. Mengoptimalkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan;
3. Mengoptimalkan Regulasi Pengelolaan Keuangan;
4. Penggalian Potensi Penerimaan Daerah;
5. Mengoptimalkan Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah;
6. Memberikan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Program Kerja;

7. Mengoptimalkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur;
8. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan sumber daya aparatur;
9. Mengoptimalkan Perencanaan Pelaksanaan Program Anggaran.

Tabel II.4 Strategi – Kebijakan

<i>No</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
(1)	(2)	(3)
	<p><u><i>Misi Kesatu</i></u></p> <p>1. Peningkatan system pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah</p>	<p>1. Mengoptimalkan Sistem Pelaporan Aset Daerah</p> <p>2. Mengoptimalkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</p>
	<p><u><i>Misi Kedua</i></u></p> <p>1. Optimalisasi potensi dan realisasipendapatan daerah</p> <p>2. Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran</p>	<p>1. Mengoptimalkan Regulasi Pengelolaan Keuangan</p> <p>2. Penggalian Potensi Penerimaan Daerah</p> <p>3. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran belanja daerah</p>
	<p><u><i>Misi Ketiga</i></u></p> <p>1. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang tupoksi SKPD</p> <p>2. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang handal</p> <p>3. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima.</p>	<p>1. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja</p> <p>2. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</p> <p>3. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan sumber daya aparatur.</p> <p>4. Mengoptimalkan Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran</p>

B. URAIAN RINGKASAN/ IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

• PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Kebijakan-kebijakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimaksudkan untuk mendukung program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai action dalam pemenuhan *organization progress*.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015, disusun suatu Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

a. Program

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi DPPKAD Kabupaten Musi Rawas adalah :

Misi Pertama : Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Program
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.	Program pembangunan Sistem Pertanahan

Misi Kedua : Penerapan Value For Money (Ekonomi, Efisien dan Efektif) dalam Pelaksanaan Anggaran

No.	Program
1.	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Misi Ketiga : Peningkatan Kualitas Aparatur

No.	Program
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
5.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
6.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Kegiatan Tahun 2015

Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi, DPPKAD Kabupaten Musi Rawas disajikan pada table Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2015 sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Meningkatnya tertib pengelolaan/manajemen aset daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	1	Jumlah SKPD yang tertib dalam pengelolaan keuangan daerah	57 SKPD	06 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.130.000,000.00
		2	Ketersediaan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CALK)	3 Dokumen	11 Penyusunan Laporan Keuangan	125.000,000.00
					18 Penghapusan Barang Milik Daerah	140,000,000.00
					20 Updating Barang Inventaris Barang Daerah	220.000,000.00
					28 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja di SKPD	25,000,000.00
					34 Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan	620,000,000.00

						15	Program Pembangunan Sistem Pertanahan	60.000,000.00
						05	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah	60.000,000.00
2.1.1	Penerapan Prinsip ekonomi, efisiensi, efektif dan kepatutan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan	1	Jumlah Regulasi dalam Pengelolaan Keuangan	10	Dokumen Regulasi	17	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4,223,250,000.00
		2	Prosentase Pencapaian Target Pendapatan	100	%	02	Penyusunan Standar satuan Harga	60,000,000.00
		3	Prosentase Peningkatan Belanja Daerah	100	%	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	223,000,000.00
						07	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	81,000,000.00
						08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	168,400,000.00
						09	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	96,600,000.00
						10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	230,000,000.00
						11	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100,000,000.00
						12	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	330,000,000.00
						16	Peningkatan manajemen Aset Barang Daerah (Simbada)	150,000,000.00
						18	Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	150,000,000.00

				20	Penyusunan dan Verifikasi RKA dan DPA Kabupaten	40,000,000.00
				21	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	30,000,000.00
				22	Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	150,000,000.00
				30	Penyelesaian Kasus-Kasus TPTGR	85,000,000.00
				31	Penertiban Aset Aset Daerah	200,000,000.00
				32	Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM)	60,000,000.00
				33	Pendistribusian SPPT-PBB dan Pemungutan PBB	175,000,000.00
				35	Penyelenggaraan UPT Pelayanan Perpajakan	179,000,000.00
				41	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak Propinsi	60,000,000.00
				43	Updating Pajak Bumi dan Bangunan	200,000,000.00
				44	Bulan Bakti dan Pemberian Penghargaan Pelunasan PBB	-
				47	Penagihan PAD	125,000,000.00
				48	Pendataan Subjek dan Objek Pajak	-
				50	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	225,000,000.00
				51	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	150,000,000.00
				52	Monitoring dan Evaluasi PAD	100,000,000.00
				53	Pemeliharaan Sarana Promosi	150,000,000.00
				55	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	64,570,000.00
				59.	Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang Pajak Daerah	75,000,000.00
				60.	Pengelolaan sistem Aplikasi PBB sektor P2	474,680,000.00
				61.	Pengadaan sarana promosi pajak daerah	91,000,000.00

3.1.1	Meningkatnya Kinerja Aparatur	1	Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	100	%	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,616,750,000.00
						01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	161,000,000.00
						06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	7,500,000.00
						07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	370,210,000.00
						08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	64,000,000.00
						10	Penyediaan Alat Tulis kantor	56,120,000.00
						11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	175,000,000.00
						12	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	65,000,000.00
						15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	146,480,000.00
						17	Penyediaan Makanan dan Minuman	55,000,000.00
						18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	250,000,000.00
						19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah	20,000,000.00
						20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis /Perkantoran	106,020,000.00
						24	Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	74,300,000.00
						26	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu	56,120,000.00
		2	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	319,000,000.00
						07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	42,300,000.00

					09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	40,500,000.00
					10	Pengadaan Mebeleur	-
					22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	52,200,000.00
					24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	124,000,000.00
					28	Pemerlihaaran Rutin/Berkala peralatan gedung Kantor	60,000,000.00
					49	Peningkatan Sarana Gedung Kantor	-
		3	Prosentase Aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya	100		03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	45,000,000.00
				%		05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	45,000,000.00
						05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	971.000,000.00
					03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	95,000,000.00
					07	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	150,000,000.00
					11	Fasilitas dan koordinasi TAPD	291,000,000.00
					22	Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	275,000,000.00
					35	Bimbingan Kerohanian Aparatur	10,000,000.00
					38	Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan	150,000,000.00
						Jumlah	8,365,000,000.00

Jumlah Anggaran Tahun 2015 Rp. **8,365.000.000,00**

1	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp.	1,130,000,000.00
2	Program Pembangunan Sistem Pertanahan	Rp.	60,000,000.00
3	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp.	4,223,250,000.00
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1,616,750,000.00

5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	319,000,000.00
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	45,000,000.00
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	971,000,000.00

Sumber: APBDP Tahun 2015

Tujuan khusus penetapan kinerja / perjanjian kinerja, antara lain adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas PPKAD Kabupaten Musi Rawas telah membuat penetapan kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Dinas PPKAD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2015 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2015.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja pemberi amanah.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Musi Rawas melaksanakan kewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 adalah laporan kinerja yang memuat pertanggung jawaban kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 dalam mencapai tujuan dan sasaran dan merupakan penyusunan LKjIP tahun keempat yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum sasaran strategis telah berhasil

dicapai, namun terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak tercapai secara maksimal.

A. CAPAIAN KINERJA DPPKAD TAHUN 2015

1. Uraian Target Capaian Kinerja Tahun yang diLaporkan dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Tahun 2015

Secara umum, Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas telah dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan. Walaupun dari sasaran yang telah ditetapkan masih terdapat beberapa sasaran yang belum menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan didalam Renstra Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis dalam tahun 2015 dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran yang didukung oleh program pada tahun 2015 yang tingkat keberhasilannya sudah dapat diwujudkan secara optimal.

Tabel 3.1 Pencapaian Target Sasaran Strategis

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator</i>	<i>Target (%)</i>	<i>Realisasi (%)</i>	<i>Capaian (%)</i>
- Meningkatnya tertib pengelolaan/ manajemen aset daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	1. Jumlah SKPD yang tertib dalam pengelolaan keuangan daerah.	57	51	89,00
	2. Ketersediaan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CALK)	3	7	233,33
- Penerapan Prinsip Ekonomi, Efisiensi, Efektif dan kepatutan dalam pelaksanaan pengelolaan	1. Jumlah Regulasi dalam Pengelolaan Keuangan (Perda,Perbup, SK Bupati, Surat Edaran)	10	100	1000
	2. Prosentase Pencapaian Target Pendapatan	100	87,30	87,30

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator</i>	<i>Target (%)</i>	<i>Realisasi (%)</i>	<i>Capaian (%)</i>
keuangan	3. Prosentase Peningkatan Belanja Daerah	100	86,08	86,08
- Meningkatnya Kinerja Aparatur	1. Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	100	100	100
	2. Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100
	3. Prosentase Aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya	100	95	95
	4. Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD	100	0	0

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar sasaran strategis yang ditetapkan, pada tahun 2015 terealisasi dengan baik. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta regulasi yang ada baik di tingkat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi, maupun Pemerintah Daerah lainnya. Rincian analisis capaian masing-masing tujuan, dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

TUJUAN DARI MISI PERTAMA	Meningkatkan manajemen aset dan akuntabilitas pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan profesional.
---------------------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan dari misi pertama telah ditetapkan dalam sasaran strategis, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

1.1.1.	Meningkatnya tertib pengelolaan/ manajemen aset daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
---------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Indikator Kinerja	Capaian			
	Tahun 2015			
	Satuan	Target	Realisasi	%
Jumlah SKPD yang tertib dalam Pengelolaan Keuangan	SKPD	57	51	89,00
Ketersediaan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CALK)	Dokumen	3	7	233,33

Secara umum capaian indikator kinerja diatas telah dapat tercapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Adapun capaian indikator kinerja tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah SKPD yang tertib dalam pengelolaan keuangan, pada tahun 2015 yang merupakan tahun terakhir dari Renstra ditargetkan 57 SKPD yang sudah tertib dalam pengelolaan keuangan dan terealisasi sebanyak 51 SKPD, ini berarti capaian indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 adalah 89,00% yang disebabkan oleh adanya Daerah Pemekaran ke Kabupaten Musi Rawas Utara yang menjadikan Kabupaten Musi Rawas dari 57 SKPD menjadi 51 SKPD serta meningkatnya pemahaman SKPD tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang tertib dan rapi melalui bimtek-bimtek dan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

2. Ketersediaan Laporan Keuangan (LRA, NERACA, CALK), pada tahun 2015 ditargetkan 3 Dokumen yang tersedia dalam penyusunan laporan keuangan dan tercapai 233,33% ini dikarenakan adanya Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang menampilkan 4 Dokumen tambahan sehingga dalam penyusunan laporan keuangan menjadi LRA, NERACA, LO, LPE, SAL, Arus Kas, CALK dan setiap SKPD harus menyusun laporannya sendiri yang terdiri dari 5 Laporan yaitu LRA, LO, LPE, Neraca dan CALK yang akan diakomodir oleh DPPKAD untuk dijadikan laporan keuangan Kabupaten Musi Rawas.

TUJUAN DARI MISI KEDUA	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip ekonomi, efisien, efektif dan kepatutan dalam pelaksanaan anggaran.
-------------------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan dari misi kedua telah ditetapkan dalam sasaran strategis, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

2.1.1	Penerapan prinsip ekonomi,efisien, efektif dan kepatutan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.2

Indikator Kinerja	Capaian			
	Tahun 2014			
	Satuan	Target	Realisasi	%
Jumlah regulasi dalam pengelolaan keuangan (Perda,Perbup,SK Bupati, Surat Edaran)	Dokumen Regulasi	10	100	1000

Prosentase Pencapaian Target Pendapatan	%	100	87,30	87,30
Prosentase Peningkatan Belanja Daerah	%	100	86,08	86,08

Secara umum capaian indikator kinerja diatas telah dapat tercapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Adapun capaian indikator kinerja tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada indikator pertama dokumen regulasi yang ditargetkan sebanyak 10 dokumen dan terealisasi kurang lebih sebanyak 100 dokumen regulasi ini menunjukkan bahwa capaian dalam pembuatan dokumen regulasi pengelolaan keuangan seperti Perda, Perbup, SK Bupati dan Surat Edaran sudah melebihi target yang telah ditetapkan dikarenakan banyaknya system dan prosedur pengelolaan keuangan yang harus dituangkan dalam suatu dokumen regulasi sebagai dasar pengelolaan keuangan.
2. Pada indikator kedua terealisasi 87,30% dari yang ditargetkan, ini menggambarkan kurang optimalnya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak serta adanya daerah pemekaran baru yang menyebabkan berkurangnya potensi pendapatan Kabupaten Musi Rawas.
3. Pada indikator ketiga dari target 100% terealisasi 86,08%. Pada indikator ketiga ini memiliki sedikit perbedaan dengan indikator lainnya semakin kecil capaian yang dihasilkan berarti adanya efisiensi anggaran dalam belanja daerah tetapi hal ini tidak harus menurunkan kinerja Pemerintah karena adanya efisiensi anggaran tersebut tetapi memikirkan bagaimana cara dengan anggaran yang minimal bisa mencapai hasil fisik yang maksimal dengan mengurangi biaya-biaya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

TUJUAN DARI MISI KETIGA	Meningkatnya Kualitas Aparatur
--------------------------------	---------------------------------------

Untuk mewujudkan tujuan dari misi ketiga telah ditetapkan dalam sasaran strategis, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

3.1.1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur
---------------	--------------------------------------

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.3

Indikator Kinerja	Capaian			
	Tahun 2014			
	Satuan	Target	Realisasi	%
Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	%	100	100	100
Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100
Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya	%	100	95	95,00
Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100	0	0

Pada indikator pertama sampai indikator keempat tidak ada kenaikan atau penurunan yang signifikan, semua telah mencapai target yang telah ditentukan.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun yang diLaporkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun yang dilaporkan dengan capaian tahun sebelumnya dan 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Tahun 2015 dengan Capaian tiga tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian (%)				
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	
-	Meningkatnya tertib pengelolaan/manajemen aset daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	1. Jumlah SKPD yang tertib dalam pengelolaan keuangan daerah.	SKPD	35	45	50	51	100	100	100	89,00
		2. Ketersediaan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CALK)	Dok	3	3	3	7	100	100	100	233,33
-	Penerapan Prinsip Ekonomi, Efisiensi, Efektif dan kepatutan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan	1. Jumlah Regulasi dalam Pengelolaan Keuangan (Perda, Perbup, SK Bupati, Surat Edaran)	Dok. Reg.	20	95	100	100	200	950	1000	1000
		2. Prosentase Pencapaian Target Pendapatan	%	99,11	97,59	102,86	87,30	99,11	97,59	102,86	87,30
		3. Prosentase	%	87,96	86,87	96,14	86,08	87,96	86,87	96,14	86,08

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian (%)			
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
	Peningkatan Belanja Daerah									
-	Meningkatnya Kinerja Aparatur									
	1. Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	%	90	100	100	100	100	100	100	100
	2. Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	90	100	100	100	100	100	100	100
	3. Prosentase Aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya	%	90	95	95	95	100	100	100	95,00
	4. Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100	0	0	0	100	0	0	0

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2014 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2013 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat bahwa tidak ada kenaikan atau penurunan yang signifikan, semua telah mencapai target yang telah ditentukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014 sampai dengan Target tahun terakhir Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan target Akhir Renstra Tahun 2015 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja 2015 dengan Target Akhir Renstra

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator</i>	<i>Realisasi 2015</i>	<i>Target 2015</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- Meningkatnya tertib pengelolaan/manajemen aset daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	1. Jumlah SKPD yang tertib dalam pengelolaan keuangan daerah.	51	57	0,89
	2. Ketersediaan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CALK)	7	3	2,33
- Penerapan Prinsip Ekonomi, Efisiensi, Efektif dan kepatutan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan	1. Jumlah Regulasi dalam Pengelolaan Keuangan (LRA, Neraca, CALK)	100	10	10,00
	2. Prosentase Pencapaian Target Pendapatan	87,30	100	0,87
	3. Prosentase Peningkatan Belanja Daerah	86,08	100	0,86
- Meningkatnya Kinerja Aparatur	1. Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	100	100	1,00
	2. Tingkat Ketersediaan	100	100	1,00

<i>Sasaran</i>	<i>Indikator</i>	<i>Realisasi 2015</i>	<i>Target 2015</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Sarana dan Prasarana Aparatur			
	3. Prosentase Aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya	95	100	0,95
	4. Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD	0	100	0

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Realisasi sd 2015	Target 2015	Capaian %	
		Realisasi						
		2012	2013	2014				
1	Jumlah SKPD yang tertib dalam Pengelolaan Keuangan	SKPD	35	45	50	51	57	0,89
2	Ketersediaan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CALK)	Dokumen	3	3	3	7	3	2,33

Persentase capaian indikator pertama jika dibandingkan dengan antara realisasi dengan yang ditargetkan pada tahun 2015 sudah mencapai 0.89 atau 89,00% dari capaian yang ditargetkan pada akhir tahun Renstra tetapi pada tahun 2013 ada 8 SKPD yang memisahkan diri menjadi Kabupaten baru sehingga target dirubah menjadi 50 SKPD dan pada tahun 2014 ada penambahan SKPD baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

sehingga jumlah SKPD yang ada di Kabupaten Musi Rawas berjumlah 51 SKPD sehingga target pada akhir tahun Renstra harus dirubah menjadi 51 SKPD. Sedangkan pada indikator kedua sampai dengan tahun 2015 sudah mencapai target yang direncanakan pada tahun 2015 yaitu 89,00%.

Tabel 3.3.2

Indikator Kinerja		Capaian				Realisasi sd 2015	Target 2015	Capaian %
		Satuan	Realisasi					
			2012	2013	2014			
1	Jumlah regulasi dalam pengelolaan keuangan (Perda,Perbup,SK Bupati, Surat Edaran)	Dokumen Regulasi	20	95	100	100	10	10,00
2	Prosentase Pencapaian Target Pendapatan	%	99,11	97,59	102,86	87,30	100	0,87
3	Prosentase Peningkatan Belanja Daerah	%	87,96	86,87	96,14	86,08	100	0,86

Persentase capaian indikator pertama jika dibandingkan dengan antara realisasi dengan yang ditargetkan pada tahun 2015 sudah mencapai 1000% dari capaian yang ditargetkan pada akhir tahun Renstra. Sedangkan pada indikator kedua sampai dengan tahun 2015 sudah mencapai 87,30% dari target yang direncanakan pada tahun 2015 yaitu 100% begitu juga pada indikator ketiga sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 86,08% dari target yang direncanakan pada tahun 2015 yaitu 100% tetapi berbeda dengan indikator lainnya pada indikator ketiga dikarenakan adanya efisiensi anggaran tanpa mengurangi capaian fisiknya.

Tabel 3.3.3

Indikator Kinerja		Capaian				Realisasi sd 2015	Target 2015	Capaian %
		Satuan	Realisasi					
			2012	2013	2014			
1	Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	%	90	100	100	100	100	1,00
2	Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	90	100	100	100	100	1,00
3	Prosentase aparatur yang	%	90	95	100	95	100	0,95

Indikator Kinerja	Capaian				Realisasi sd 2015	Target 2015	Capaian %
	Satuan	Realisasi					
		2012	2013	2014			
mempunyai kompetensi dibidangnya							
4 Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100	0	0	0	100	0

Pada indikator pertama, kedua dan ketiga memiliki capaian indikator kinerja sebesar 100% dari yang ditargetkan pada tahun 2015 yang diharapkan akan bertahan sampai akhir tahun renstra. Sedangkan pada indikator keempat pada tahun 2013-2015 tidak ada capaian karena program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut tidak lagi dilaksanakan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2015 dengan standar nasional (jika ada)

(Bila tidak ada) Tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan standar nasional karena SKPD belum mempunyai Standar Pelayanan Minimal.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran seperti yang dijelaskan di atas antara lain didukung oleh:

- a. Semakin meningkatnya Pemahaman SDM SKPD tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang tertib dan rapi dengan semakin tingginya kesadaran yang dimiliki oleh aparatur untuk meningkatkan kapasitasnya baik melalui pendidikan formal maupun non formal.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang cukup memadai.

- c. Tersedianya Dokumen-dokumen regulasi sebagai dasar Pengelolaan Keuangan.
- d. Semakin membaiknya regulasi dengan wajib pajak.
- e. Semakin sedikitnya piutang tak tertagih dari tahun lalu karena adanya kesadaran wajib pajak.

Namun demikian, ada beberapa indikator yang walaupun pencapaiannya sudah baik namun masih perlu ditingkatkan seperti prosentase pencapaian target pendapatan. Tercapainya target yang ditetapkan yang belum maksimal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Terbatasnya potensi daerah merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan APBD Kabupaten Musi Rawas.
- b. Penggalan potensi pendapatan daerah yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendapatan daerah.
- c. Penyesuaian system pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pola peningkatan kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. kondisi masyarakat yang belum biasa menerima terjadinya peningkatan aktivitas pada suatu kegiatan yang dapat secara langsung berdampak kepada peningkatan pajak atau retribusi daerah sehingga dapat mempengaruhi pendapatan daerah sehingga tidak mencapai target yang diinginkan;
- b. Terbatasnya potensi daerah merupakan kendala yang harus dihadapi dalam mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah,

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, maka diambil langkah-langkah antisipatif sebagai berikut:

- a. Optimalisasi sumberdaya manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Upaya meningkatkan potensi daerah
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing.
- d. Memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan sehingga pelaksanaan kerja dapat memenuhi kriteria waktu, mutu dan hasil sesuai dengan target kinerja.

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan pernyataan kinerja tahun 2015 SKPD telah berkomitmen untuk melaksanakan 7 program dan 62 kegiatan yang semuanya telah dilaksanakan dengan optimal sehingga capaian baik dari segi penganggaran dan dari segi kinerja yang dilaporkan telah tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2015 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar **Rp.8.365.000.000,-** dengan

realisasi anggaran sebesar **Rp.7.041.439.261,-** dengan capaian sebesar **84,18%.**

Realisasi belanja pada tahun 2015 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5
1	06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.130.000.000,-	917.401.728,-	81,19
2	15	Program Pembangunan Sistem Pertanahan	60.000.000,-	56.695.000,-	94,49
3	17	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4.223.250.000,-	3.773.285.542,-	89,35
4	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.616.750.000,-	1.276.410.450,-	78,95
5	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	319.000.000,-	169.518.000,-	53,14
6	03	Program peningkatan Disiplin Aparatur	45.000.000,-	36.285.000,-	80,63
7	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	971.000.000,-	811.843.541,-	83,61
Jumlah			8.365.000.000,-	7.041.439,261,-	84,18

(Sumber data : Penetapan Kinerja 2015/ Anggaran perubahan)

Sasaran di atas telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian program kegiatan hampir mencapai 100% karena adanya penghematan penggunaan dana dan adanya dana yang tidak terserap atau tidak dilaksanakan secara optimal, itu dapat dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian sasaran.

B.1. ASPEK PENDUKUNG LAINNYA

1. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Sumber daya manusia DPPKAD Kabupaten Musi Rawas per-31 Desember 2015 berjumlah **86** (delapan puluh enam) orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Golongan	a	b	c	D	Jumlah (orang)
I	-	-	-	-	0
II	1	-	7	1	9
III	16	20	12	19	67
IV	7	2	1	-	10
Jumlah					86

b. Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Esselon II	1
2	Esselon III A	1
3	Esselon III B	7
4	Esselon IV A	29
5	Esselon IV B	3
Jumlah		41

c. Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah					
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Kepala Dinas	1					
2	Sekretaris	1					
3	Kepala Bidang	5	2				

4	Kepala Seksi/ Subbag.	5	16		3		
5	Kepala UPTD		3		1		
6	Kasub.Tata Usaha		3				
7	Staf	1	32	3	10		
Jumlah		13	56	3	14		

2. Sarana Penunjang

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Musi Rawas dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Tanah dan Bangunan

Bangunan gedung kantor terletak di Jalan Agropolitan Center Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Muara Beliti berjumlah 8 Gedung beserta kelengkapan bangunan.

2) **Inventaris dan peralatan kantor** yang dimiliki terdiri dari Alat Kantor dan Rumah tangga berjumlah 98 item, Alat Studio dan Komunikasi berjumlah 12 unit, Alat laboratorium berjumlah 4 unit dan Instalasi berjumlah 5 unit.

3) **Kendaraan Roda 4 (empat)** sebanyak 2 unit, Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 24 unit.

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 mendapat nilai sebesar 66,18 % dengan kategori B (Baik).

Rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas untuk dapat ditindaklanjuti pada tahun 2015 adalah:

1. Mempublikasikan Renstra SKPD melalui Website Kabupaten Musi Rawas;
2. Mempublikasikan Penetapan Kinerja (PK) SKPD melalui Website Kabupaten Musi Rawas;
3. Mempublikasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Website Kabupaten Musi Rawas;
4. Melakukan Pengukuran Kinerja yang sudah dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi;
5. Melakukan pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja;
6. Mengupload Laporan Kinerja kedalam website Kabupaten Musi Rawas;
7. Mereviu dokumen Renstra secara berkala;
8. Menyusun/menetapkan SOP pengumpulan data Kinerja.

Rekomendasi tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas untuk penguatan akuntabilitas kinerja unit kerja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015 kami buat sebagai Pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja kami selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan Kinerja kami sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Musi Rawas.

Secara umum dapat diidentifikasi bahwa permasalahan/ hambatan yang dijumpai dalam mencapai kinerja antara lain adalah :

- a. Dalam aktifitas ekstensifikasi belum dapat dilaksanakan diversifikasi dari berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang ada, karena kondisi masyarakat yang belum biasa menerima terjadinya peningkatan aktivitas pada suatu kegiatan yang dapat secara langsung berdampak kepada peningkatan pajak atau retribusi daerah sehingga dapat mempengaruhi pendapatan daerah sehingga tidak mencapai target yang diinginkan;
- b. Terbatasnya potensi daerah merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan APBD Kabupaten Musi Rawas.

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan anggaran tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan, adapun pengelompokan upaya yang telah dilakukan adalah :

- a. Optimalisasi sumberdaya manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Upaya meningkatkan potensi daerah yang ada melalui :
 1. Mengadakan pengkajian dan penelitian yang ada kaitannya dengan potensi pendapatan daerah
 2. Mengintensifikasi potensi daerah yang ada melalui :
 - a. Penggalian potensi pendapatan daerah yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendapatan daerah.
 - b. Penyesuaian system pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pola peningkatan kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - c. Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan system pelayanan minimal.
 - d. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - e. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran selanjutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan kinerja DPPKAD Kabupaten Musi Rawas akan terus menjadi lebih baik secara berkesinambungan, sehingga pemanfaatan potensi daerah Kabupaten Musi Rawas dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan bagi kepentingan masyarakat.

Kepada seluruh staf DPPKAD Kabupaten Musi Rawas diucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kontribusinya sehingga apa yang telah direncanakan tahun 2015 telah dapat kita selesaikan dengan baik, kami sampaikan pula himbauan untuk kita semua kedepan mari kita tingkatkan kinerja kita sehingga apa-apa yang ditugaskan kepada kita akan dapat kita laksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga amanah yang dibebankan kepada kita akan mendapat ridho dari Allah SWT. Amien.

PERENCANAAN STRATEGIS Tahun 2011 - 2015

Instansi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas

Visi : Terciptanya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilandasi dengan Prinsip Ekonomis, Efisien dan Efektif (Value For Money)

Misi :

1. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Penerapan Value For Money (Ekonomi, Efisien dan Efektif) dalam pelaksanaan Anggaran;
3. Peningkatan Kualitas Aparatur.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikatif						Kebijakan	Program	Kegiatan	Keterangan			
					Tahun Capaian					Transisi							
					2010	2011	2012	2013	2014						2015		
1.1	Meningkatkan Manajemen aset dan akuntabilitas pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan profesional	1.1.1 Meningkatkan tertib pengelolaan/ manajemen Aset Daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	1	Jumlah SKPD yang tertib dalam pengelolaan keuangan daerah	SKPD	20	30	35	45	50	57	1	Mengoptimalkan Sistem Pelaporan Aset Daerah	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11	Penyusunan Laporan Keuangan	2011- 2015
			2	Ketersediaan Laporan Keuangan (LRA,Neraca,CALK)	Dokumen	3	3	3	3	3	3	2	Mengoptimalkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		18	Penghapusan Barang Milik Daerah	2010 - 2015
			19	Penyusunan Laporan Aset Daerah	2010 - 2013												
			20	Updating Barang Inventaris Barang Daerah	2010 - 2015												
			28	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja SKPD	2013-2015												
			31	Penyusunan Analisa Kebutuhan Barang Daerah	2011												
			32	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Belanja Daerah	2011												
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2010												

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikatif						Kebijakan	Program	Kegiatan	Keterangan					
					Tahun Capaian					Transisi									
					2010	2011	2012	2013	2014						2015				
													02	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	2010				
													11	Peningkatan Administrasi dan Penyampaian Laporan Keuangan	2010				
													34	Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan	2012 - 2015				
												15	Program Pembangunan Sistem Pertanahan	05	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah	2012-2013			
2.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip ekonomi, efisien, efektif dan kepatutan dalam pelaksanaan anggaran	2.1.1	Penerapan Prinsip ekonomi, efisien, efektif dan kepatutan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.	1	Jumlah Regulasi dalam pengelolaan keuangan (Perda, Perbup, SK Bupati, Surat Edaran)	Dokumen Regulasi	10	10	10	10	10	10	3	Mengoptimalkan Regulasi Pengelolaan Keuangan	17	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	02	Penyusunan Standar satuan Harga	2010 - 2015
				2	Prosentase Pencapaian Target Pendapatan	%	100	100	100	100	100	100	4	Penggalian Potensi Penerimaan Daerah			06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	2010 - 2015
				3	Prosentase Peningkatan Belanja Daerah	%	100	100	100	100	100	100	5	Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran belanja daerah			07	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2010 - 2015
																	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	2010 - 2015
																	09	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2010 - 2015
																	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2010 - 2015

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikatif						Kebijakan	Program	Kegiatan	Keterangan	
					Tahun Capaian					Transisi					
					2010	2011	2012	2013	2014						2015
													11	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2010 - 2015
													12	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	2010 - 2015
													16	Peningkatan manajemen Aset/ barang Daerah (SIMBADA)	2012-2015
													18	Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	2011- 2015
													20	Penyusunan dan Verifikasi RKA dan DPA Kabupaten	2010 - 2015
													21	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2013-2015
													22	Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	2010 - 2015
													23	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang bersumber dari sumber daya alam	2010
													24	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PPH Pasal 21, 25, dan 29	2010
													26	Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB	2010
													30	Penyelesaian Kasus-Kasus TPTGR	2010 - 2015
													31	Penertiban Aset Aset Daerah	2010 - 2015
													32	Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM)	2010 - 2015
													33	Pendistribusian SPPT-PBB dan Pemungutan PBB	2010 - 2015

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikatif						Kebijakan	Program	Kegiatan	Keterangan
					Tahun Capaian					Transisi				
					2010	2011	2012	2013	2014					
												34	Pengkajian Sumber-sumber Pendapatan	2010 - 2012
												35	Operasional UPTD DPPKAD/ Penyelenggaraan UPT	2010 - 2015
												39	Penyusunan Raperda dan Raperkada Pajak dan Retribusi Daerah	2010 - 2013
												41	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak Propinsi	2010 - 2015
												43	Updating Pajak Bumi dan Bangunan	2010 - 2015
												44	Bulan Bakti dan Pemberian Penghargaan Pelunasan PBB	2010 - 2015
												45	Monitoring Penerimaan Pemerintah Daerah	2010.2011
												46	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3)	2010
												47	Penagihan PAD	2010 - 2015
												48	Pendataan Subjek dan Objek Pajak	2010 - 2015
												49	Updating Subjek dan Objek PAD	2010
												50	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	2011 - 2015
												51	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	2011-2015
												52	Monitoring dan Evaluasi PAD	2012-2015
												53	Pemeliharaan Sarana Promosi	2012 - 2015
												54	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2012

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikatif						Kebijakan	Program	Kegiatan	Keterangan					
					Tahun Capaian					Transisi									
					2010	2011	2012	2013	2014						2015				
													55	Pemeliharaan Kendaraan dinas Operasional	2012-2015				
													56	Penelusuran aset-aset daerah	2013				
													59	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	2014-2015				
													60	Pengelolaan Sistem Aplikasi PBB Sektor P2	2014-2015				
													61	Pengadaan Sarana Promosi Pajak Daerah	2014-2015				
3.1	Meningkatnya Kualitas Aparatur	3.1.1	Meningkatnya Kinerja Aparatur	1	Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	%	90	90	90	100	100	100	6	Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan program kerja	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2010 - 2015
																	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	2010 - 2015
																	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	2010 - 2015
																	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2010 - 2015
																	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2010 - 2015
																	10	Penyediaan Alat Tulis kantor	2010 - 2015
																	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2010 - 2015
																	12	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	2010 - 2015
																	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2010 - 2015
																	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2010 - 2015
																	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2010 - 2015

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikatif						Kebijakan	Program	Kegiatan	Keterangan				
					Tahun Capaian					Transisi								
					2010	2011	2012	2013	2014						2015			
													18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	2010-2015			
													19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah	2010-2015			
													20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis /Perkantoran	2010-2015			
													24	Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	2010-2015			
													26	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu	2010 -2015			
			2	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	90	90	90	100	100	100	7	Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	03	Pembangunan Gedung Kantor	2010, 2013
																05	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	2010
																07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2010 - 2015
																09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2010 - 2015
																10	Pengadaan Mobeleur	201,020,112,013
																22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	2010 - 2015
																24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	2010 - 2015
																26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2010 - 2013

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikatif						Kebijakan	Program	Kegiatan	Keterangan	
					Tahun Capaian					Transisi					
					2010	2011	2012	2013	2014						2015
													28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor	2013-2015

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikatif						Kebijakan	Program	Kegiatan	Keterangan				
					Tahun Capaian					Transisi								
					2010	2011	2012	2013	2014						2015			
												29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeleur	2010				
												49	Peningkatan Sarana Gedung Kantor	2011 - 2015				
			3	Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya	%	90	90	90	95	95	100	8	Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan sumber daya aparatur	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	2013-2015
													05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2010,2011,2013- 2015	
															07	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	2010 - 2015	
															11	Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Penyusunan Anggaran	2010 - 2015	
															17	Bimtek Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	2010	
															22	Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	2010 - 2015	
															31	Bimbingan Kerohanian Aparatur	2011 - 2015	
															38	Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan	2012 - 2015	
															39	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	2013	
														18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	09	Pembinaan dan Fasilitasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan Daerah	2013
			4	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100	100	100	100	100	100	9	Mengoptimalkan Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	24	Operasional Perencanaan Pembangunan Daerah di SKPD	2012

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikatif						Kebijakan	Program	Kegiatan	Keterangan
					Tahun Capaian					Transisi				
					2010	2011	2012	2013	2014					





RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

KABUPATEN
SKPD

: MUSI RAWAS
: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
1		2		3	
1.1.1	Meningkatnya tertib pengelolaan/manajemen aset daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	1	Jumlah SKPD yang tertib dalam pengelolaan aset daerah	57	SKPD
		2	Ketersediaan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CALK)	3	Dokumen
2.1.1	Penerapan Prinsip ekonomi, efisiensi, efektif dan kepatutan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan	1	Jumlah Regulasi dalam Pengelolaan Keuangan	10	Dokumen
		2	Prosentase Pencapaian Target Pendapatan	100	%
		3	Prosentase Peningkatan Belanja Daerah	100	%
3.1.1	Meningkatnya Kinerja Aparatur	1	Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	100	%
		2	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%
		3	Prosentase Aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya	100	%
		4	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD	100	%

**PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2015**

KABUPATEN
SKPD

: MUSI RAWAS
: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1		2		3	4	5	
1.1.1	Meningkatnya tertib pengelolaan/manajemen aset daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	1	Jumlah SKPD yang tertib dalam pengelolaan keuangan daerah	SKPD	57	51	89,00
		2	Ketersediaan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CALK)	Dokumen	3	7	233.33
2.1.1	Penerapan Prinsip ekonomi, efisiensi, efektif dan kepatutan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan	1	Jumlah Regulasi dalam Pengelolaan Keuangan (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Surat Edaran)	Dokumen Regulasi	10	100	1000
		2	Prosentase Pencapaian Target Pendapatan	%	100	87.30	87.30
		3	Prosentase Peningkatan Belanja Daerah	%	100	86.08	86.08
3.1.1	Meningkatnya Kinerja Aparatur	1	Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	%	100	100	100
		2	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100
		3	Prosentase Aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya	%	100	95	95,00
		4	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	100	0	0

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015

: Rp. 8.365.000.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015

: Rp. 7.041.439.261,-



INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U) 2011 - 2015
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TUGAS POKOK DAN FUNGSI : Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi.

Adapun Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut ;

- a. Perumusan kebijakan teknis dan program kerja dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi pendapatan, pendataan wajib pajak, wajib retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya, penyusunan program, perubahan dan perhitungan APBD serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- d. Penyusunan rencana dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- e. Penyelenggaraan pembukaan dan pelaporan pendapatan, belanja dan aset daerah;
- f. Pengkoordinasi, pengendalian dan pembinaan atas pelaksanaan pemungutan, pendapatan, belanja dan aset daerah;
- g. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- h. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak penghasilan (PPH);
- i. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas;
- j. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- k. Pengesahan DPA - SKPD
- l. Pengendalian pelaksanaan APBD
- m. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah
- n. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah
- o. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan / lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk
- p. Pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
- q. Penyimpanan uang daerah

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3		4	5	6
1.1.1	Meningkatnya tertib pengelolaan/ manajemen aset daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.	1	Jumlah SKPD yang tertib dalam pengelolaan keuangan daerah SKPD	Seluruh Kabid	Laporan tahunan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang tertib dalam pengelolaan keuangan daerah}}{\text{Jumlah SKPD Kabupaten}} \times 100\%$
		2	Ketersediaan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CALK) Dokumen	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	Laporan tahunan	$\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan yang diperlukan}}{\text{Jumlah Laporan Keuangan}} \times 100\%$
2.1.1	Penerapan Prinsip ekonomi, efisien, efektif dan kepatutan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan	1.	Jumlah Regulasi dalam pengelolaan keuangan (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Surat Edaran) Dokumen Regulasi	Seluruh Kabid	Laporan tahunan	$\frac{\text{Jumlah Regulasi yang diperlukan}}{\text{Jumlah Regulasi yang ada}} \times 100\%$

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan	
1	2	3		4	5	6	
		2	Prosentase Pencapaian Target Pendapatan	%	Kabid PAD	Laporan tahunan	$\frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Total Target Pendapatan}} \times 100\%$
		3	Prosentase Peningkatan Belanja Daerah	%	Kasubbag Keuangan	Laporan tahunan	$\frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$
3.1.1	Meningkatnya Kinerja Aparatur	1.	Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	%	Sekretaris	Laporan tahunan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan yang terealisasi}}{\text{Jumlah Kegiatan yang ada}} \times 100\%$
		2.	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	Sekretaris	Laporan tahunan	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang ada}} \times 100\%$
		3.	Prosentase Aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya	%	Sekretaris	Laporan tahunan	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang mempunyai kompetensi}}{\text{Jumlah seluruh aparatur}} \times 100\%$
		4.	Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam DPA SKPD	%	Kabid Anggaran	Laporan tahunan	$\frac{\text{Jml program renja SKPD yang diakomodir dlm DPA SKPD}}{\text{Jumlah program dalam DPA SKPD}} \times 100\%$

Muara Beliti,

2011

KEPALA DINAS PPKAD KAB. MUSI RAWAS

H. GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 1989 03 1 016